

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi membuat berbagai aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Kegiatan yang dahulunya yang dikerjakan secara manual oleh manusia yang tentunya menggunakan biaya yang besar bisa diminimalisir dengan pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari bekerja, proses belajar mengajar, hingga dalam dunia bermain.

Salah satu dari teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi informasi. Teknologi informasi bisa membantu aktivitas manusia untuk mengirim dan menerima informasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Kita tidak perlu berjalan puluhan kilometer untuk mendapatkan sebuah informasi. Semua itu bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Pada saat ini banyak sekali kantor kedinasan atau pemerintahan yang memanfaatkan sistem informasi untuk menyediakan atau memberikan layanan secara online yang dapat diakses oleh masyarakat tentunya untuk mempermudah dan meminimalisir waktu. Kemajuan sistem informasi ini juga dimanfaatkan oleh salah satu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yaitu yang dinamakan SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan)

Sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER) sebuah aplikasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memberikan layanan

informasi ketenagakerjaan. Aplikasi ini dapat diunduh di Google Play Store, aplikasi ini mempunyai fungsi sebagai memberikan pelatihan kerja, memberikan kesempatan kerja, dan informasi lowongan pekerjaan, terutamanya untuk para calon pekerja yang berada di Kota Padang maupun luar Kota Padang.

Masyarakat Kota Padang yang ingin mencari informasi lowongan pekerjaan atau pelatihan kerja tentunya sangat berharap pada Aplikasi SISNAKER ini yang telah memberikan informasi mengenai layanan pelatihan serta informasi lowongan pekerjaan yang berada di Kota Padang maupun luar Kota Padang. Akan tetapi pengguna yang ingin mengakses aplikasi tersebut untuk mencari informasi lowongan pekerjaan atau ingin mendaftar pelatihan kerja sangat minim, karena ada beberapa yang kurang memahami proses jalannya pada aplikasi tersebut, dan masyarakat lebih memilih datang langsung ke Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian ketimbang mengakses aplikasi tersebut, Maka diperlukan analisa yang bertujuan terhadap kepuasan pengguna pada sistem aplikasi yang sedang berjalan. Agar masyarakat lebih memilih akses melalui sistem aplikasi SISNAKER dari pada datang langsung ke kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Penelitian dilakukan mengikuti standar kerangka kerja Cobit 4.1.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISA SISTEM APLIKASI SISNAKER (SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN) TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 (STUDI KASUS: KANTOR TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PADANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu :

1. Bagaimana membentuk analisa sistem aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) terhadap kepuasan pengguna pada Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dengan menggunakan *Framework* COBIT 4.1?
2. Bagaimana mengelola hasil analisa sistem aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) pada Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang ?
3. Bagaimana kepuasan pengguna terhadap sistem aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan)?

1.3 Batasan masalah

Agar penulisan ini lebih terarah serta pembahasan permasalahan yang dihadapi tidak meluas dan menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan terhadap sistem penulisan, adapun batasan dari penulisan yaitu:

1. Dalam proses Analisa Sistem Aplikasi mengacu pada standar *Framework* cobit 4.1 domain ME (*Monitor and Evaluate*).
2. Data yang digunakan dalam analisa kepuasan pengguna dan pembahasan masalah adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner.
3. Objek penelitian adalah Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.

4. Merancang dan menguji Program perhitungan kuesioner cobit 4.1 domain me menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL.

1.4 Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan sementara atau pemecahan masalah yang bersifat sementara dimana akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penulis membuat hipotesa, yaitu :

1. Dengan membentuk analisa sistem aplikasi diharapkan dapat membuat perencanaan analisa sistem aplikasi terhadap kepuasan pengguna pada Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota menggunakan *Framework* COBIT 4.1 dengan efektif dan efisien.
2. Dengan adanya penerapan *Framework* COBIT 4.1 dalam menganalisa sistem aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) terhadap kepuasan pengguna pada Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang diharapkan dapat menambah kepuasan para pengguna.
3. Dengan adanya penilaian kepuasan pengguna terhadap sistem aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) diharapkan dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna sistem informasi yang digunakan.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisa Sistem aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) terhadap kepuasan pengguna berdasarkan kerangka kerja COBIT 4.1 domain ME(*Monitor and Evaluate*).

2. Merancang dan menguji aplikasi perhitungan hasil kuesioner analisa sistem aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) menggunakan *Framework* COBIT 4.1.
3. Aplikasi dirancang dengan menggunakan bahasa pemograman Php dan Database MySql.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dalam pengukuran Sistem aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) terhadap kepuasan pengguna Pada Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.

2. Manfaat Bagi Penulis

- a. Sebagai batu loncatan bagi penulis untuk menetapkan dan mengembangkan wawasan dibidang ilmu pengetahuan komputer, sehingga penulis mampu menciptakan suatu sistem yang bermanfaat bagi instansi pemerintahan menggunakan metode COBIT 4.1.

- b. Sebagai acuan bagi penulis dalam penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang berpedoman pada peraturan Walikota Padang No. 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Adapun tujuan dibentuknya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya pendapatan perkapita, berkembangnya usaha perdagangan dan industri dengan indikator persentase kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian, meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha dengan indikator menurunnya angka pengangguran terbuka.

1.7.1 Sejarah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang baru dibentuk pada 01 Januari Tahun 2017, merupakan pemecahan dan penggabungan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan terhadap publik yaitu di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Tujuan di bentuknya dinas tenaga kerja dan perindustrian adalah mewujudkan kesejahteraan ketenagakerjaan, dengan terwujudnya kesejahteraan ketenagakerjaan pendapatan perkapita masyarakat diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya serta meningkatnya daya saing IKM, diharapkan pelaku IKM dapat melanjutkan

kelangsungan hidupnya, sehingga IKM dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi apapun. Sejarah ketenagakerjaan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dan zaman sesudah kemerdekaan seperti di bawah ini:

a. Zaman Sebelum Kemerdekaan

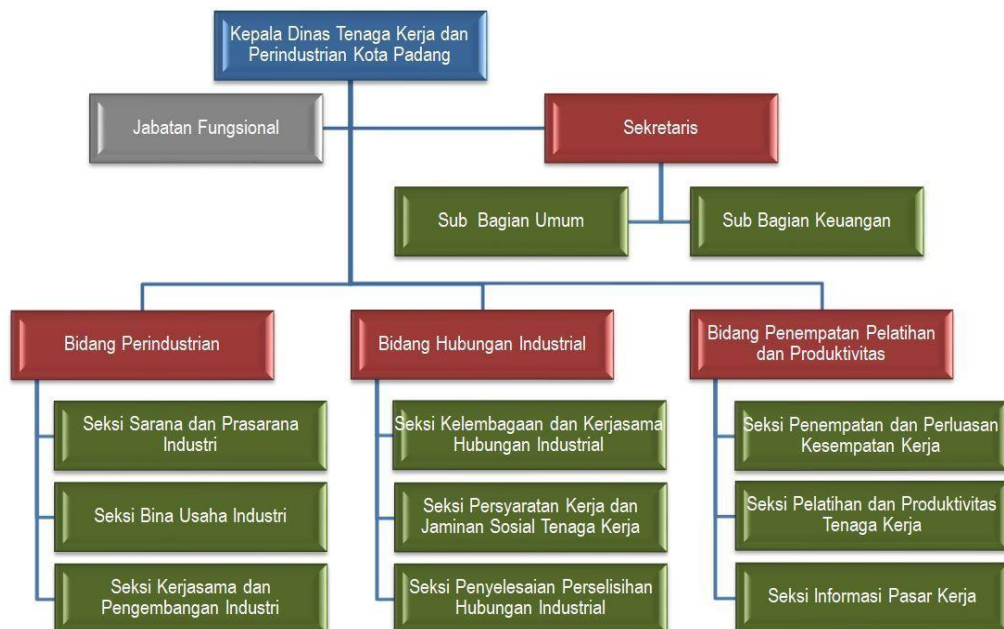
Riwayat perburuhan sama artinya dengan membicarakan sejarah hubungan perburuhan di Indonesia sejak zaman penjajahan sampai dengan masa sekarang ini. Dalam berbagai literatur yang paling banyak dibicarakan adalah riwayat hukum perburuhan pada zaman penjajahan Belanda, sedangkan pada zaman penjajahan Jepang sangat sedikit dijumpai, hal ini disebabkan karena pemerintah Jepang di Indonesia pada masa itu hanya bertujuan untuk mencari tentara untuk melawan sekutu, disamping adanya tujuan politis lainnya sehingga mengenai masalah perburuhan tidak diperhatikan sama sekali.

b. Zaman Sesudah Kemerdekaan

Kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan babak baru perlindungan terhadap buruh atau pekerja, sebab dengan kemerdekaan berarti berlakunya tata hukum negara Indonesia merdeka dan tidak berlakunya lagi tata hukum pemerintah kolonial. Namun berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 masih banyak peraturan perundang-undangan warisan kolonial masih tetap berlaku, tetapi secara berangsur-angsur diperbarui dan digantikan oleh produk bangsa Indonesia sendiri.

1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran formal organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsi, uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang disusun untuk membantu pencapaian hasil usaha perusahaan serta pengendaliannya secara efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang ada pada Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

1.7.3 Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Gambar 1.1 struktur organisasi pada Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dapat diuraikan tugas dan fungsi yang harus dilakukan tiap unit kerja sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian dan tugas perbantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya urusan ketenagakerjaan dan perindustrian yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi. Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pelayanan yang prima dan optimal di ketenagakerjaan dan perindustrian.
- b. Mengarahkan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran.
- c. Menetapkan laporan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

2. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugasnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

- b. Melaksanakan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan.
- c. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik.

3. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum melaksanakan tugasnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretariat. Sub bagian umum mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi.
- b. Melakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar.
- c. Melakukan urusan pengadaan peralatan kantor atau perlengkapan kantor.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretariat. Sub bagian keuangan mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu sekretariat dalam melaksanakan pengelolaan administrasi.
- b. Membantu sekretariat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan.
- c. Melakukan penyimpanan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Produktivitas

Bidang penempatan, pelatihan, dan produktivitas melaksanakan tugasnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang penempatan, pelatihan, dan produktivitas mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyaluran pencari kerja melalui sistem antar kerja.
 - b. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
 - c. Melaksanakan perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
6. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja bertanggung jawab kepada kepala bidang penempatan, pelatihan, dan produktivitas. Seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan perencanaan tenaga kerja.
 - b. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja.
 - c. Melakukan pembinaan dan monitoring penggunaan tenaga kerja asing.
7. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja bertanggung melaksanakan tugasnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penempatan, pelatihan, dan produktivitas. Seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan pedoman standarisasi.
- b. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan sertifikasi.
- c. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan akreditasi tenaga kerja.

8. Seksi Informasi Pasar Kerja

Seksi informasi pasar kerja berada di bawah tanggung jawab kepada kepala bidang penempatan, pelatihan, dan produktivitas. Seksi informasi pasar kerja mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyebarluasan informasi kesempatan kerja.
- b. Membantu kepala bidang dalam membuat dan menganalisis laporan informasi pasar kerja bulanan.

9. Bidang Hubungan Industrial

Bidang hubungan industrial di pimpin oleh seorang kepala bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang hubungan industrial mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan di bidang pembinaan dan pelayanan persyaratan kerja.
- b. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

10. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial

Seksi kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial di pimpin oleh seorang kepala seksi yang melaksanakan tugasnya berada di bawah tanggung jawab kepala bidang hubungan industrial. Seksi kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan dan meningkatkan pembinaan kelembagaan kerja sama hubungan industrial.
- b. Melakukan pembentukan dan memberdayakan dewan pengupahan kota.
- c. Melakukan pelayanan pencatatan, verifikasi dan evaluasi organisasi pekerja.

11. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah tanggung jawab kepala bidang hubungan industrial. Seksi Persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala bidang dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan.
- b. Membantu kepala bidang dalam penyusunan pelayanan persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Membantu kepala bidang dalam penyusunan kebijakan pengupahan.

12. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada kepala bidang hubungan industrial. Seksi penyelesaian dan perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian kasus-kasus perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan

pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan.

- b. Melakukan penanganan pengaduan awal aksi demo, unjuk rasa dari perusahaan atau pekerja.
- c. Melakukan dokumentasi dan pelaporan aksi demo, unjuk rasa dari perusahaan atau pekerja.

13. Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang perindustrian mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala dinas dalam memberikan bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia.
- b. Merumuskan perencanaan pembinaan dan pengembangan industri.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja terkait.

14. Seksi Sarana dan Prasarana Industri

Seksi sarana dan prasarana industri dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perindustrian. Seksi sarana dan prasarana industri mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri.
- b. Melakukan pembinaan asosiasi, kelembagaan atau industri.
- c. Melakukan penataan dan bimbingan kawasan atau lingkungan industri.

15. Seksi Bina Usaha Industri

Seksi bina usaha industri dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perindustrian. Seksi bina usaha industri mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan pembinaan berbagai jenis usaha industri.
- b. Merancang dan menyusun rencana pembinaan industri.
- c. Melakukan koordinasi serta fasilitasi kemitraan usaha industri kecil, menengah dan besar.

16. Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Industri

Seksi kerja sama dan pengembangan industry dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perindustrian. Seksi kerja sama dan pengembangan industri mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri.
- b. Melakukan fasilitasi kemitraan dan kerja sama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan pembangunan industri.

17. Jabatan Fungsional

Pada dinas dapat di tempatkan pegawai negeri sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional melaksanakan tugas nya berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas.